



Korupsi dan Ketidaksetaraan Gender Sebagai Tantangan Utama *Good Governance* di India

Winy Permataningtyas *

Submitted: 01 Agustus 2020 Revision: 11 Januari 2021 Accepted: 23 Januari 2021

Abstrak

India merupakan negara di wilayah Asia dengan jumlah penduduk kedua terbanyak di dunia setelah Tiongkok. Pertumbuhan ekonominya mencapai 6 hingga 7 persen selama 10 tahun terakhir ini membuat India menjadi negara berkembang dengan perekonomiannya yang berkembang pesat. Namun sayangnya dibalik pertumbuhan perekonomian yang berkembang pesat itu, terdapat isu lama yakni isu kesetaraan gender dan korupsi yang terus menghantui di belakangnya. Ketidaksetaraan gender dan korupsi yang membayangi perpolitikan di India menyebabkan banyaknya isu kemiskinan, pengangguran, pemerintahan yang lemah hingga hilangnya hak-hak perempuan di negara dengan penduduk terbanyak kedua di dunia tersebut. Oleh karena itu, di dalam tulisan ini akan menguraikan bahwa indikator ketidaksetaraan gender dan indikator korupsi dapat menjadi suatu tantangan utama bagi India sebagai negara dalam mencapai suatu *good governance*. Pentingnya adanya kesetaraan gender dan ketegasan dalam mengatasi kasus korupsi akan dijelaskan di dalam tulisan sebagai suatu saran agar terciptanya *good governance* di dalam negara khususnya di India.

Kata Kunci: India, kesetaraan gender, korupsi, *good governance*

Abstrak

India is a country in the Asian region with the second largest population in the world after China. Its economic growth has reached 6 to 7 percent over the last 10 years, making India a developing country with a fast growing economy. But unfortunately behind this fast growing economic growth, there is an old issue, namely the issue of gender equality and corruption that continues to haunt its back. Gender inequality and corruption that haunts Indian politics have led to many issues of poverty, unemployment, weak governance and the loss of women's rights in the world's second most populous country. Therefore, this paper will describe that indicators of gender inequality and indicators of corruption can be a major challenge for India as a country in achieving good governance. The importance of gender equality and assertiveness in overcoming corruption cases will be explained in the paper as a suggestion for the creation of good governance in the country, especially in India.

Password: India, gender equality, corruption, good governance

How to Cite: Permataningtyas, G. P. (2020). Korupsi dan Ketidaksetaraan Gender Sebagai Tantangan Utama *Good Governance* di India. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 13 (1): 56-63.

*Corresponding author: Winy Permataningtyas.

E-mail: winypermata.2206@gmail.com

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender dan korupsi merupakan isu yang kerap kali terjadi di berbagai negara di dunia. Isu tersebut dinilai sebagai isu umum atau hal yang lumrah sehingga banyak pihak seperti individu maupun pemerintah menganggap bukanlah sesuatu yang darurat untuk diatasi. Padahal dampak yang diberikan dari kedua isu tersebut merupakan dampak yang langsung dirasakan oleh banyak masyarakat biasa serta menghambat negara tersebut untuk terus maju dan berkembang. Kedua isu tersebut menjadi suatu batu besar yang menghalangi dan sulit untuk dilewati. Kebanyakan negara yang masih berkebutuhan dengan isu kesetaraan gender maupun korupsi adalah negara-negara berkembang yang dimana tingkat pendapatan perkapitanya masih tergolong rendah. Tata kelola di negara-negara tersebut pun belum baik. Pemerintah negara berkembang seringkali dianggap pemerintahan yang lemah karena hukum tidak berlaku sebagaimana adanya, kurang adanya transparansi, seringkali adanya diskriminasi, serta partisipasi politik dari berbagai pihak pun minim. Hampir

setiap negara di berbagai benua tersandung isu tersebut. Contoh negara yang masih menderita dan terjerat ke dalam isu kesetaraan gender dan korupsi adalah Nigeria, Nikaragua, Zimbabwe, Kenya, dan India.

Isu kesetaraan gender dan juga korupsi bukanlah sesuatu yang asing lagi apabila dikaitkan dengan negara India. Hal tersebut sudah terjadi dari zaman nenek moyang di India. Meskipun zaman telah berganti, adanya globalisasi, serta dunia telah menjadi lebih modern namun kedua isu tersebut masih melekat bahkan seakan mendarah daging di negara India. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya, norma, serta nilai yang dipercayai dan diikuti oleh masyarakat India yakni menempatkan laki-laki sebagai posisi nomor satu sedangkan perempuan berada di posisi ke dua. Posisi tersebut berlaku di segala sektor seperti di rumah tangga maupun di tempat kerja. Begitupula dengan isu korupsi di India yang dimana telah menjadi hal lumrah tidak hanya di sektor pemerintahan melainkan di beberapa sektor utama lainnya. Kebanyakan informasi hanya dipegang oleh elit-elit politik sehingga tidak

adanya transparansi dan kurangnya akses terhadap informasi bagi masyarakat sipil di negara tersebut. Kedua penulis tersebut menyebutkan bahwa korupsi di India merupakan warisan dalam pemerintahan di India. Mulai dari katakana sebelumnya, isu terkait pemilihan umum pertama di India, korupsi dan kesetaraan gender sebagian dari anggota kongres dihujani merupakan isu kuno namun masih tuduhan atas tindakan korupsi. Selain terus terjadi hingga zaman modern ini. itu, tindakan korupsi juga sangat erat

Seperti yang dikatakan oleh penulis dengan *black market* dalam industri Jeevan S.Rajak (2013) di dalam yang menguntungkan maupun sektor tulisannya berjudul "*Corruption in India: Nature, Causes, Consequences and Cure*", menjelaskan bahwa korupsi merupakan rahasia umum dalam suatu negara demokrasi. Kasus atau tindakan sangat mengeras di India. Di dalam korupsi ini juga berkaitan dengan isu-sistem parlemen India, tanggung jawab isu lainnya seperti isu keadilan, akses dalam melakukan eksekusi terkait pada *power*, transparansi informasi, dengan kebijakan-kebijakan yang telah dan hubungan antara negara-dibuat oleh pemerintahan legislatif masyarakat. Jaringan korupsi di India diambil alih oleh birokrasinya itu sendiri di definisikan sebagai suatu sendiri. Sedangkan birokrasi di India interaksi finansial dan birokrasi yang pun tidak dapat dipercaya karena dilakukan oleh masyarakat serta birokrasinya termasuk ke dalam zona perusahaan-perusahaan dengan merah kasus korupsi serta prosedurnya perwakilan pemerintah dari semua yang rumit. Tata kelola di India juga tingkatan. Jaringan korupsi tersebut dikategorikan sebagai tata kelola yang menjadi suatu kegiatan sehari-hari kurang transparansi dalam penegakan masyarakat disana sehingga sudah peraturannya. Korupsi di India sudah tidak lagi dianggap asing (Miklian, terjadi bahkan sejak awal negara India 2013).

merdeka Selain korupsi, isu kesetaraan gender dalam sektor pekerjaan

maupun politik juga terjadi di India. sektor-sektor umum. Kurangnya Banyak tulisan-tulisan yang pendidikan juga menyebabkan menjabarkan bahwa di India sangat minimnya partisipasi politik dari kurang dalam kesetaraan gender. gender wanita di India. Padahal Berdasarkan tulisan Singh (2016) yang partisipasi dari gender wanita dalam berjudul "*The State of Gender Inequality* perpolitikan merupakan suatu *in India*", tidak hanya adanya prasyarat dasar untuk adanya pembatasan akses wanita kepada kesetaraan gender dan demokrasi yang sumber daya dan kesempatan- utuh. Partisipasi dalam politik ini tidak kesempatan yang ada, melainkan pula hanya pemberian hak pilih kepada kepada perihal-perihal lainnya yang masyarakat bergender wanita menyangkut prospek hidup ke melainkan adanya *sharing power* dan depannya. Wanita di India hanya dapat keterlibatan wanita dalam menjadi melakukan pekerjaan domestik dan pembuat kebijakan pada setiap membatasi akses mereka terhadap tingkatan dalam tata kelola partisipasi dalam ekonomi, politik, pemerintahan di suatu negara pergaulan sosial, bahkan akses (Krishnaveni, 2017). Antara isu korupsi pendidikan. Padahal, kurangnya dan kesetaraan gender ini saling pendidikan pada wanita dapat berkaitan satu sama lain untuk menyebabkan permasalahan yang lebih menciptakan suatu tata kelola yang luas lagi seperti kurangnya baik (*good governance*) dalam suatu pengetahuan terkait dengan hubungan pemerintahan.

sex, pernikahan dini, bahkan dapat Di dalam tulisan yang meningkatkan potensi wanita terkena diterbitkan oleh *Department of penyakit HIV/AIDS* menurut *The International Development*, Britania Raya National Family Health Survey (1998- (2015) menjelaskan bahwasanya wanita 1999). cenderung tidak akan melakukan

Peran wanita di berbagai sektor tindakan korupsi daripada pria. di India sangatlah minim. Mereka Kemudian berdasarkan penelitian dari memberlakukan pengecualian- World Bank menemukan bahwa pengecualian kepada gender wanita di semakin tinggi perwakilan wanita

dalam suatu pemerintahan berkaitan kebijakan tersebut diimplementasikan. lurus dengan semakin rendahnya Konteks dari tata kelola ini bisa tingkat korupsi di pemerintahan beragam seperti tata kelola dalam tersebut. Oleh karena itu, penulis perusahaan, tata kelola di dunia kemudian melihat bahwa indikator internasional, maupun tata kelola korupsi dan kesetaraan gender nasional. Tata kelola yang penulis merupakan indikator penting bagi maksudkan dalam tulisan ini yakni tata negara untuk menciptakan suatu *good* kelola nasional suatu negara (India). Di *governance*. dalam tata kelola yang baik (*good*

Penelitian ini penulis buat (*governance*) terdapat 8 karakteristik untuk menyuarakan serta memberikan utama yaitu: a) partisipasi; b) orientasi saran tidak hanya untuk negara India consensus; c) *accountable*; d) namun negara-negara berkembang transparansi; e) *equitable and inclusive*; lainnya yang juga terjerat isu dan f) mengikuti peraturan dalam kesetaraan gender dan korupsi. Hal ini hukum. Dalam melihat indikator dikarenakan penulis meyakini korupsi, penulis akan menggunakan bahwasanya antara isu kesetaraan teori realis yang dimana korupsi itu gender dan korupsi memiliki sendiri erat kaitannya dengan keterkaitan erat sebagai penghambat kepentingan maupun keuntungan utama negara untuk menciptakan pribadi atau suatu kelompok. suatu pembangunan yang Sedangkan untuk melihat indikator berkelanjutan sehingga sulit kesetaraan gender, penulis akan terciptanya *good governance* di negara menggunakan teori feminis karena di tersebut. Oleh karena itu, penulis akan dalam kasus ini terdapat diskriminasi menggunakan dua indikator penting yang terjadi pada mayoritas wanita di itu sebagai variabel utama tantangan India.

yang dihadapi oleh negara India untuk mencapai suatu *good governance*. Tata kelola atau *governance* yang dimaksud yakni suatu proses dalam pembuatan kebijakan dan suatu proses bagaimana

HASIL DAN PEMBAHASAN

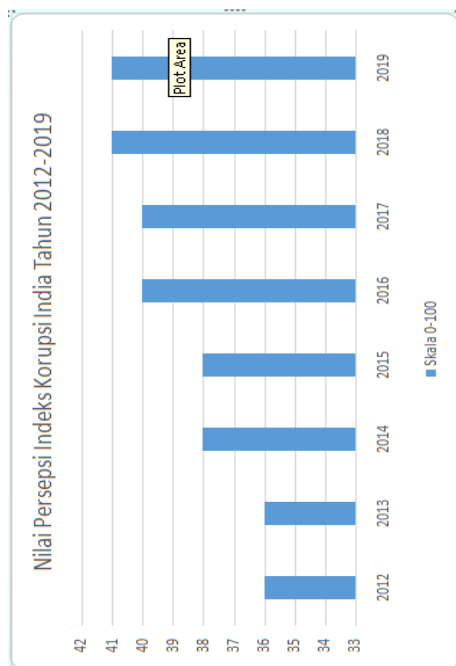
1. Korupsi di India

Korupsi itu sendiri memiliki banyak definisi berbeda. Kata "*corrupt*" pertama kali digunakan oleh

Aristotle dan kemudian oleh Cicero dimana mereka mendefinisikannya sebagai suatu perihal perampokan dan penolakan atas perilaku yang baik. Menurut kamus Oxford, kata "*corrupt*" berarti "dipengaruhi oleh perampok, khususnya pada saat pemilihan umum". Ensiklopedia Britannica juga mengatakan bahwa korupsi merupakan suatu praktik yang melibatkan perampokan; namun memiliki hubungan dengan sistem pemilihan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya, menurut para ahli, Morris menuliskan bahwasanya korupsi merupakan suatu penggunaan kekuatan publik yang illegal dimana hal tersebut bertujuan mendapatkan keuntungan untuk kepentingan pribadi atau suatu kelompok tertentu. Hal tersebut sama dengan definisi yang diberikan oleh World Bank yakni korupsi merupakan "*abuse of public power for private benefit*" namun, keuntungan pribadi yang dimaksudkan disini tidak hanya

untuk kepentingan pribadi atau hanya satu orang melainkan juga dapat menguntungkan suatu kelompok tertentu baik dalam suatu perusahaan maupun dalam pemerintahan.

India menempati peringkat 80 dari 180 negara di tahun 2019 berdasarkan dari *Corruption Perception Index* (CPI). Dilihat dari tahun 2012 hingga tahun 2019, total nilai yang didapatkan oleh India terkait dengan penilaian indeks korupsi di India tidak terlalu meningkat secara signifikan. Itu berarti, kasus-kasus korupsi masih kerap terjadi di negara India dari tahun ke tahunnya.



Tabel 1. 1 Nilai Persepsi Indeks Korupsi di India Tahun 2012-2019

Sumber: Transparency International

Kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para politisi di India dan pihak-pihak lainnya dalam sistem birokrasi adalah sebagai berikut:

1. *Coalgate Scam* (Cost – 186000 Crores)
2. *2G Spectrum Scam* (Cost – 176000 Crores)
3. *Commonwealth Games Scam* (Cost – 70000 Crores)

Seperti yang penulis telah katakan sebelumnya, korupsi di India sudah mendarah daging di dalam sistem pemerintahan dan birokrasinya. Kasus korupsi yang telah menjalar ke hampir seluruh lapisan pemerintahan di India ini sudah berawal sejak awal India merdeka. Konstitusi pemerintahan di India terdiri dari tiga bagian yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Fungsi dari tiap-tiap bagian sama seperti pemerintahan demokrasi lainnya. Namun sayangnya, perilaku untuk melakukan korupsi telah menjadi tingkah laku dasar para pihak yang menduduki kursi pemerintahan.

Terdapat beberapa penyebab yakni (Arman, 2011 & Kundu, 2015): a) Kurangnya efektifitas dalam manajemen dan organisasi. Kurangnya pengontrolan dan pemantauan pada proses administrasi mengantarkan kepada tindakan korupsi. Selain itu, penunjukkan pihak manajer maupun badan eksekutif lainnya yang tidak efisien dan tidak *capable* juga mengantarkan pada perihal mismanajemen. Oleh karena itu, akibat dari adanya kesalahan penunjukan adalah korupsi dan hal tersebut akan

terus menerus dilakukan.; b) politisi bisa mendapatkan suara Kurangnya stabilitas ekonomi. Krisis sehingga memenangkan pemilihan. perekonomian dan adanya kenaikan Biasanya politisi akan melakukan harga yang cukup signifikan penyuaapan kepada masyarakat yang mengakibatkan adanya perubahan perekonomiannya kurang dan kurang dalam gaya hidup masyarakat. berpendidikan.; d) Kurangnya Kebanyakan masyarakat dalam kesadaran dan kerelaan masyarakat. menghadapi situasi tersebut untuk (Arman, 2011 & Kundu, 2015)

melanjutkan hidup akan melakukan hal-hal yang illegal dan jauh dari nilai-nilai moral. Mereka lebih memilih menggunakan "jalan pintas" untuk mencapai keinginannya daripada harus bekerja keras. Hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan sehingga kebanyakan pemangku kebijakan yang menggunakan "jalan pintas" cenderung akan melakukan tindak korupsi.; c) Pemilihan umum. Pada saat pemilihan umum, korupsi berada di puncaknya karena pada saat itu terjadi pihak-pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan personal (industrialis terkemuka) memberikan biaya kepada para politisi untuk melakukan kampanye selama periode sebelum pemilihan umum. Para pemilik kepentingan personal melakukan penyuaapan agar dapat memengaruhi politisi di kemudian hari, dan dengan penyuaapan tersebut

Apabila masyarakat memutuskan untuk tidak setuju atau tidak melakukan penyuaapan di setiap proses administrasi maupun institusi politik maka tingkat korupsi akan dapat berkurang. Namun hal tersebut kembali lagi kepada proses administrasi yang cenderung lambat karena adanya mismanajemen dimana banyak pihak-pihak yang tidak *capable* mengurus hal tersebut serta kurangnya pendidikan bagi masyarakat dan adanya krisis perekonomian yang menuntut beberapa pihak melakukan penyuaapan dan tindak korupsi. Tindakan korupsi tersebut kemudian berdampak kepada banyak hal, yaitu: a) Meningkatkan kemiskinan., b) Meningkatkan isu kelaparan., c) Hilangnya kekayaan untuk negara India., d) Rendahnya tingkat kesejahteraan hidup., e)

Rendahnya tingkat keadilan hukum. Dampak-dampak yang dihasilkan dari tindak korupsi ini tidak hanya merugikan pihak-pihak maupun sektor tertentu melainkan banyak sekali pihak yang terkena dampak dari tindak korupsi dan tidak hanya di sektor pemerintahan melainkan dalam sektor

socio-ekonomi juga terkena dampak dari masifnya tindak korupsi. Apabila dianalogikan, korupsi ini seperti "spaghetti bowl" dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih kompleks lagi dan sulit sekali untuk diuraikan satu persatu.

Sebagian besar tindak korupsi yang dilakukan oleh beberapa pihak secara umum bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*personal gain*) atau untuk mencapai kepentingan suatu kelompok. Mengingat sifat dasar dari manusia itu sendiri adalah tidak baik dan ingin menang sendiri, maka mereka melakukan tindak korupsi. Manusia dapat dikatakan sebagai *Homo Homini lupus*, yakni manusia adalah serigala bagi manusia lainnya yang dimana yang kuat akan memakan yang

lemah atau yang kuat akan menindas yang lemah. Pihak yang kuat disini merupakan para pemangku kebijakan atau para birokrat yang melakukan tindak korupsi untuk keuntungannya sendiri dan menindas masyarakat yang lemah agar kepentingannya tetap terjaga.

Sudah jelas sekali bahwa dengan masifnya tindak korupsi menandakan bahwa tata kelola di negara tersebut tidak baik. Menurut tulisan yang diterbitkan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, menyebutkan beberapa karakteristik untuk menciptakan tata kelola yang baik. Kurang lebih terdapat tiga poin yang menyimpang yaitu:

- a) Transparansi; Segala bentuk kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada. Selain itu, perlu adanya informasi secara detail mengenai kebijakan tersebut yang dapat diakses secara bebas oleh seluruh masyarakatnya. Namun, apabila ada tindak korupsi di

dalamnya, dapat dipastikan bahwa lemahnya sisi transparansi ini.

- b) Peraturan dalam Hukum; Di dalam suatu tata kelola yang baik, kerangka hukum akan bersifat adil. Adanya dukungan dari sektor judisial dan kepolisian yang bersih sehingga hukum yang berlaku benar-benar dapat ditegakkan dan diterapkan dengan adil. Namun sayangnya, di negara yang tingkat korupsinya cukup tinggi, penyuaapan kerap terjadi di sektor judisial dan kepolisian sehingga hukum yang berlaku tidak benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya.
- c) Efektifitas dan Efisiensi; Menciptakan suatu *good governance* berarti institusi tersebut akan mengeluarkan kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Hal ini tidak mencerminkan negara berkorupsi yang dimana kebijakan yang diambil bukan

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas melainkan untuk memenuhi kebutuhan sebagian orang atau sebagian kelompok yang menguntungkan bagi para birokrasi.

2. Kesetaraan Gender di India

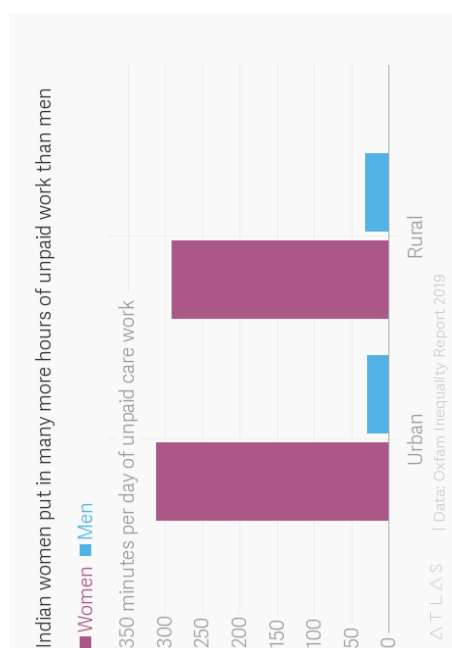
United Nations Children's Fund (2017) telah menjabarkan definisi dan konsep terkait dengan kesetaraan gender secara umum yakni suatu konsep dimana laki-laki dan perempuan memiliki kondisi, perlakuan, dan peluang atau kesempatan yang setara dalam mengembangkan potensialnya secara maksimal dan dalam berkontribusi untuk perkembangan ekonomi, sosial, budaya, serta dunia perpolitikan. Hal tersebut juga sama dengan definisi kesetaraan gender menurut kamus Cambridge yaitu "*the act of treating women and men equally*" dan menurut KBBI, kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,

ekonomi, sosial, budaya, dan kesamaan antara wanita dengan laki-laki di dalam menikmati hasil pembangunan. berbagai sektor.

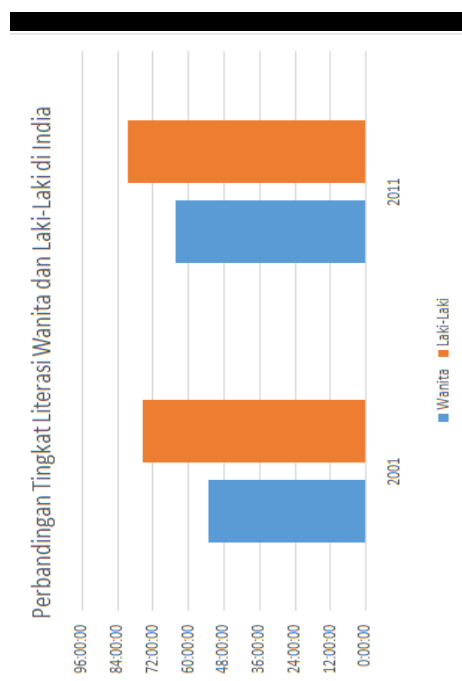
Kesetaraan yang dimaksud yakni setara dalam nilai yang diberikan oleh masyarakat. Hal tersebut bukan berarti laki-laki dan perempuan harus menjadi sesuatu yang sama namun lebih kepada hak-hak yang diberikan, tanggung jawab, dan kesempatan harus diberikan tanpa bergantung kepada gendernya laki-laki ataupun perempuan.

Berdasarkan dari laporan Indeks Ketidaksetaraan Gender (GII) yang dipaparkan oleh UNDP di tahun 2018, India menempati urutan ke 122 dimana 11.7% bangku pemerintahan ditempati oleh wanita. Hal tersebut jauh lebih rendah daripada Bangladesh yang berada di angka 20.3%. Dari tahun 2010 hingga 2018 jumlah wanita yang mengenyam pendidikan hingga sekolah menengah atas hanya 39%, jauh berbeda dengan jumlah laki-laki yakni di angka 63.5%. Begitu pula dengan tingkat partisipasi dalam menjadi tenaga kerja, wanita sebanyak 23.6% dimana laki-laki mencapai 78.6%. Angka-angka tersebut jelas memperlihatkan adanya kesenjangan

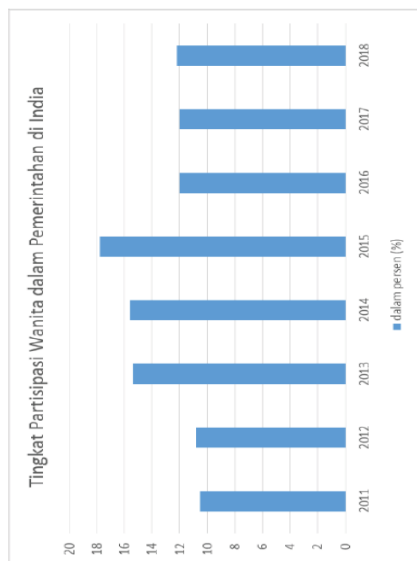
Isu kesetaraan gender di India juga merupakan isu yang telah lama melekat di India. Kasus kesetaraan gender ini pun menyebar di berbagai sektor mulai dari di sektor pendidikan, tempat kerja, hingga partisipasi politik di luar atau di dalam pemerintahan. Contoh yang sering kali terjadi pada wanita di tempat kerja adalah jumlah wanita yang tidak dibayar lebih banyak dibandingkan laki-laki. Tingkat kemampuan literasi wanita dari tahun 2001 hingga 2011 juga tidak terlalu signifikan perkembangannya. Padahal kemampuan literasi merupakan bekal utama seseorang untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut kemudian berdampak kepada rendahnya angka representasi wanita di dalam kursi pemerintahan di India.



Tabel 1. 2 Perbandingan Jumlah Wanita Pekerja yang Tidak Dibayarkan dengan Laki-Laki



Tabel 1. 3 Perbandingan Tingkat Literasi Wanita dan Laki-Laki di India
Sumber: MOSPI Government India, 2018



Tabel 1. 4 Tingkat Partisipasi Wanita dalam Pemerintahan di India
Sumber: MOSPI Government India, 2018

Sama seperti isu korupsi, isu kesetaraan gender juga saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Adanya *gender gap* pada pengenyaman pendidikan di India yang dimana masih didominasi oleh laki-laki menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan terjadi di tempat kerja dan kurangnya partisipasi politik dari perempuan. Perempuan tidak memiliki pengetahuan maupun edukasi yang lebih tinggi dibanding laki-laki sehingga apabila terjadi diskriminasi seperti di tempat kerja, perempuan

tidak dapat melakukan perlawanan karena rendah pengetahuan yang dimiliki. Karena kurangnya pendidikan pun menyebabkan perempuan sulit untuk duduk di bangku pemerintahan dan ikut andil secara langsung dalam keputusan suatu kebijakan. Oleh karena itu, kebanyakan kebijakan yang dihasilkan akan menguntungkan laki-laki karena sudut pandangnya hanya dari laki-laki sehingga semakin memperpanjang budaya patriarki yang ada disamping itu semakin massif pula diskriminasi serta *gender gap* yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan (Krishnaveni, 2017).

Budaya, kultur, serta nilai yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat India juga dapat menjadi salah satu penyebab ketidaksetaraan gender di India tetap bertahan lama hingga zaman modern ini. Konstruksi sosial yang menyatakan bahwa setiap tugas, fungsi, peran, dan nilai-nilai yang berasal dari laki-laki dinilai lebih baik dan menguntungkan daripada yang berasal dari perempuan. Ada pula keyakinan terkait dengan pembagian divisi pekerjaan antara laki-laki dan perempuan dimana aktivitas

di dalam rumah seperti mengurus kebijakan dalam pemerintahan secara keluarga, memasak, mencuci, dan langsung. Hal tersebut menjadi penting sebagainya sedangkan laki-laki karena tidak ada pihak lain yang akan melakukan aktivitas yang di luar menyuarakan hak-hak perempuan rumah seperti berpartisipasi dalam yang terdiskriminasi apabila bukan politik, dll. Hal tersebut menyebabkan dari para perempuan itu sendiri. berkembangnya hirarki dan pemikiran Dampak utama yang akan terjadi di berbagai kawasan India bahwasanya apabila partisipasi politik dari wanita laki-laki berada pada nomor satu masih minim adalah ketidaksetaraan sedangkan wanita di nomor kedua gender serta isu-isu diskriminasi (Kassa, 2015). Padahal sebagai negara terhadap wanita pun akan tetap kerap demokrasi seharusnya wanita juga terjadi. Untungnya, berdasarkan dari memiliki kesempatan yang sama penelitian Nisha & Vezhaventhan dengan laki-laki mengenai (2018) menyatakan bahwasanya partisipasinya dalam perpolitikan. berdasarkan data statistik partisipasi Dengan adanya partisipasi politik yang politik wanita rata-rata mengalami aktif dan massif dari wanita di India, kenaikan walaupun tidak secara akan meningkatkan kualitas demokrasi signifikan. Itu berarti mulai ada di India dan dapat memberikan *insight-kesadaran* dari para wanita untuk *insight* baru untuk kebijakan-kebijakan menyuarakan hak-haknya serta usaha yang akan dibuat nantinya sehingga agar tidak terdiskriminasi di sektor-tidak melulu merugikan pihak wanita sektor umum.

di India itu sendiri.

Isu kesetaraan gender yang

Seperti yang penulis telah disuarakan oleh para feminist ini katakan sebelumnya bahwasanya bukan berarti antara laki-laki dan partisipasi politik wanita di dalam wanita menjadi sama tetapi lebih negara demokrasi sangat penting. kepada memberikan kesadaran Tidak hanya sebagai pihak yang bahwasanya para wanita juga memiliki mendapatkan suara saat pemilihan hak-hak untuk berpendapat, hak untuk melainkan juga partisipasi sebagai memilih sesuatu, hak untuk pihak yang terlibat dalam pembuatan mengenyam pendidikan, dan lain-lain.

Tanpa ada kesadaran tersebut, wanita Di dalam karakteristik *good governance*, akan selalu menjadi pihak yang isu korupsi dan kesetaraan gender dirugikan tidak hanya di sektor umum tidak mewakili beberapa poin seperti tempat kerja dan pemerintahan diantaranya seperti partisipasi, melainkan juga di sektor-sektor privat peraturan dalam hukum, transparansi, seperti rumah tangga. Adanya serta poin efektifitas dan efisiensi. kesetaraan gender juga merupakan Sudah jelas hal tersebut menjadi suatu bentuk sistem demokrasi untuk penyebab tidak terciptanya *good* berjalan dengan lancar sehingga dapat *governance* di India. Antara indikator menciptakan suatu tata kelola yang korupsi dan kesetaraan gender itu baik. Di dalam karakteristik utama *good* sendiri memiliki suatu korelasi. *governance* terdapat poin partisipasi Adanya korelasi terkait dengan yang dimana partisipasi dari laki-laki korupsi dan gender ini pun masih dan wanita merupakan kunci utama menjadi perdebatan antara para ahli di untuk menciptakan suatu tata kelola dunia internasional. Beberapa ahli yang baik (*good governance*) menyatakan bahwa tidak ditemukan (UNESCAP, nd). Dalam tata kelola suatu korelasi. Namun di sisi lain, yang baik menyebutkan bahwa setiap banyak pula ahli yang menemukan pihak harus berpartisipasi aktif korelasi antara korupsi dan gender sehingga pemerintah dapat melalui penelitiannya yang bersifat mengeluarkan suatu kebijakan yang empiris. Seperti yang telah penulis dapat memenuhi kebutuhan sebutkan sebelumnya, penulis melihat masyarakatnya dan masyarakat pun apabila kasus korupsi suatu dimensi mendapatkan hak mereka (Bundschuh-gender terdapat korelasi mekanisme Rieseneder, 2008). sebab akibat. Pasaunya, beberapa

3. Korelasi Korupsi dan Kesetaraan Gender di India dan Solusi dalam Menciptakan *Good Governance* sumber telah menjabarkan bahwasanya adanya korelasi antara tingkat korupsi dengan *women empowerment* dimana semakin tinggi tingkat partisipasi wanita dalam politik khususnya partisipasi wanita dalam pembuatan

kebijakan di suatu negara yang dapat menodai prestasinya menunjukkan semakin rendah tingkat tersebut. Seperti contohnya di India korupsi di negara tersebut (UKAid, sendiri, isu-isu diskriminasi yang 2015). Sebaliknya, apabila tingkat dirasakan oleh kaum wanita, hak-hak partisipasi wanitanya rendah maka wanita yang tidak terpenuhi, serta tingkat korupsi di negara itu kebijakan publik yang cenderung cenderung tinggi. Hal tersebut menguntungkan kaum laki-laki daripada disebabkan oleh perempuan disebabkan karena adanya

- a) Wanita melihat tindakan korupsi sebagai suatu tindakan yang sangat beresiko dan wanita lebih cenderung untuk tidak mengambil tindakan yang beresiko tinggi.
- b) Wanita melihat tindakan korupsi sebagai sesuatu yang tabu untuk dilakukan sehingga akan ada tekanan sosial tersendiri bagi wanita apabila melakukan hal tersebut.
- c) Wanita cenderung lebih memegang teguh nilai dan moral daripada laki-laki.

Kebanyakan wanita memandang posisi dalam pemerintahan merupakan suatu prestasi yang sangat *valuable*, kesempatan yang sangat langka, dan beruntung karena dapat ikut andil di dalamnya sehingga mereka cenderung untuk tidak melakukan tindak korupsi

gender gap dalam pemerintahan dan birokrasi yang dimana didominasi oleh laki-laki. Di sisi lainnya, tindak korupsi pun massif dilakukan karena hal itu sudah menjadi hal lumrah untuk dilakukan sedangkan bagi wanita itu merupakan hal yang tabu. Tindak korupsi yang dilakukan pun umumnya hanya menguntungkan pihak laki-laki karena kaum perempuan cenderung memutuskan untuk tidak terlibat ke dalamnya. Untuk melanggengkan dan memudahkan tindakan-tindakan korupsi lainnya, maka kursi-kursi pemerintahan dan birokrasi terus didominasi oleh laki-laki sehingga akan terus mengakibatkan adanya *gender gap* di dalam perpolitikan. Oleh karena itu, India akan sulit untuk mencapai suatu tata kelola yang baik (*good governance*) apabila isu korupsi dan ketidaksetaraan gender masih

sangat melekat di kehidupan pola pikir yang baru, maka diharapkan masyarakat India sehari-hari. generasi-generasi wanita muda di India

Untuk mengurangi tingkat tergerak untuk mengenyam korupsi dan *gender gap* di India untuk pendidikan yang lebih layak dan lebih menciptakan suatu tata kelola yang tinggi lagi untuk mencapai cita-citanya baik adalah perlu adanya partisipasi seperti yang diinginkan. Dengan wanita yang lebih aktif lagi tidak hanya pendidikan yang lebih tinggi maka di sektor-sektor publik melainkan akan membuka pemikiran-pemikiran partisipasi secara politik untuk dapat baru yang lebih kritis sehingga andil dalam keputusan suatu meningkatkan kesempatan untuk kebijakan. Dengan adanya partisipasi dapat andil langsung dalam politik dari wanita dalam keputusan keputusan kebijakan di pemerintahan. kebijakan maka dapat menyuarakan Adanya peningkatan partisipasi wanita hak-hak wanita yang selama ini secara signifikan dalam politik terlupakan atau terabaikan karena diharapkan dapat mengurangi *power* yang dimiliki oleh wanita kesempatan tindak korupsi.

cenderung dianggap lebih lemah Selain itu, perlu adanya koneksi dibandingkan laki-laki. Untuk sosial dan kerjasama yang erat antar meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat. Koneksi sosial berguna wanita itu sendiri sangat diperlukan untuk menyebarkan pengaruh ke adanya *women empowerment* atau dalam suatu lingkup lingkungan. pemberdayaan perempuan dalam skala Koneksi sosial itu sendiri terbentuk besar. Hal tersebut berguna untuk dari adanya kerjasama yang erat antar membentuk pola pikir baru, masyarakat. Kerjasama untuk saling pandangan serta nilai baru mengingatkan dan menyadarkan bahwasanya wanita juga bisa menjadi perilaku-perilaku yang tidak baik seperti laki-laki. Wanita juga memiliki untuk dilakukan sehingga dapat hak-hak peran seperti laki-laki, wanita membentuk suatu kebiasaan baru yang dapat menjadi sosok pemimpin dan lebih baik. Setelah terbentuk kebiasaan wanita juga berhak untuk menentukan baru yang lebih baik itu, dengan pilihannya sendiri. Dengan adanya adanya koneksi secara sosial maka

kebiasaan baru itu akan mudah hanya dapat melakukan pekerjaan-mempengaruhi pihak-pihak lainnya. pekerjaan yang bersifat privat atau di Masyarakat juga harus lebih pintar lagi dalam rumah tangga. Kedua indikator dalam memilih wakil-wakilnya yang tersebut pula menjadi penyebab utama duduk di kursi pemerintahan serta tidak terciptanya tata kelola yang baik harus lebih kritis lagi dalam melihat di India karena kurangnya dan mengevaluasi tindak lanjut dari transparansi, hukum yang mudah tindakan-tindakan korupsi yang disuap, birokrasi dan kebijakan yang dilakukan oleh para birokrat. tidak efektif dan efisien serta adanya

SIMPULAN

Isu korupsi dan kesetaraan gender sudah menjadi semacam penyakit dalam yang sulit sekali disembuhkan. India sebagai negara berkembang yang cukup besar di wilayah Asia masih berurusan dengan masalah tersebut hingga saat ini. Adanya mismanajemen, serta kesenjangan ekonomi menjadi penyebab korupsi di negara tersebut yang kemudian berdampak kepada kemiskinan, kelaparan, tingkat pengangguran dan masalah-masalah yang bersifat sosio-ekonomi lainnya. Begitupula dengan permasalahan kesetaraan gender yang salah satu penyebabnya adalah budaya serta nilai yang dianut oleh masyarakat India itu sendiri yang menempatkan laki-laki diatas wanita dan menganggap wanita

gender gap dalam partisipasi masyarakat khususnya dalam perpolitikan yang masih didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itu, untuk menciptakan suatu tata kelola global diperlukan adanya *women empowerment* dalam skala besar yang bertujuan untuk mengubah pola pikir wanita di India serta adanya koneksi sosial dan kerjasama yang erat antar masyarakat untuk sama-sama menjadi pengawas dan melakukan evaluasi terhadap perihal yang menyimpang dari sebagaimana mestinya. Korupsi dan kesetaraan gender memang mustahil dapat hilang dari muka bumi ini namun alangkah baiknya apabila rasionya semakin berkurang dan terciptanya suatu tata kelola yang baik sehingga permasalahan dalam negara itu pun dapat berkurang karena

pemerintahannya sudah tertata dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Bundschuh-Rieseneder, Friederike. (2008). *Good Governance: Characteristics, Methods, and The Austrian Examples*. Transylvanian Review of Administrative Sciences. Pp 26-52.

Department for International Development UK Aid. (2015). *Why Corruption Matters: Understanding Causes, Effects, and How to Address Them*. UK Aid. Dilansir dari https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/406346/corruption-evidence-paper-why-corruption-matters.pdf pada 15 April, 20.00 WIB.

Ganguly, Sumit. (2012). *Corruption in India: An Enduring Threat*. Journal of Democracy. Vol 23(1). Pp 138-148.

Kassa, Shimelis. (2015). *Challenges and Opportunities of Women Political Participation in Ethiopia*. Journal of Global Economics. Vol 03.

Krishnaveni D. (2017). *Gender Equity and Political Participation*. IOSR Journal of Humanities and Social Science. Vol 22(10). Pp 01-04.

Kundu, Mousumi. (2015). *Some Aspects of Corruption in India in 21st Century*. International Journal of Scientific and Research Publications. Vol 5 (12). Pp 155-205.

Miklian, Jason & Carney, Scott. (2013). *Corruption, Justice, and Violence in Democratic India*. SAIS Review. Vol 33(1). Pp 37-49.

Ministry of Statistics and Programme Implementation Government of India. (2018). *Women and Men in India: A Statistical Compilation of Gender Related Indicators in India*. Government of India. Dilansir dari

http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/Women%20and%20Men%20in%20India%202018.pdf

f pada 23 April 2020, 13.20 WIB.

Nisha, M Ameen & Vezhaventhan, D. (2018). *Political Empowerment and Participation of Women in India*. International Journal of Pure and Applied Mathematics. Vol 120(5). Pp 4721-4736.

Rajak, Jeevan S. (2013). *Corruption in India: Nature, Causes, Consequences, and Cure*. IOSR Journal of Humanities and Social Science. Vol 18 (5). Pp 20-24.

Singh, Sumanjeet. (2016). *The State of Gender Inequality in India*. Gender Studies. Pp 139-157.

Transparency International. (2019). *Corruption Perception Index 2019*.

Transparency International. Dilansir dari <https://www.transparency.org/cpi2019> pada 17 April 2020, 14.00 WIB.

United Nations Children's Fund. (2017). *Glossary of Terms and Concepts*. UNICEF. Dilansir dari

<https://www.unicef.org/rosa/media/1761/file/Gender%20glossary%20of%20terms%20and%20concepts%20.pdf> pada 19 April 2020, 13.45 WIB.

United Nations Development Programme. (2018). *Human Development Reports: Gender Inequality Index (GII)*. UNDP. Dilansir dari <http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-inequality-index-gii> pada 20 April 2020, 19.15 WIB.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (n.d). *What is Good Governance*. UNESCAP. Dilansir dari <https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf> pada tanggal 14 April 2020, 18.00 WIB.

Comment [u8]: Tidak ada dalam isi jurnal

Comment [u9]: Tidak ada dalam isi jurnal

Comment [u1]: Tidak ada dalam isi jurnal

Comment [u10]: Tidak ada dalam isi jurnal

Comment [u2]: Tidak ada dalam isi jurnal

Comment [u11]: Tidak ada dalam isi jurnal

Comment [u3]: Tidak ada dalam isi jurnal

Comment [u4]: Tidak ada dalam isi jurnal

Comment [u5]: Tidak ada dalam isi jurnal

Comment [u12]: Tidak ada dalam isi jurnal

Comment [u6]: Tidak ada dalam isi jurnal

Comment [u7]: Tidak ada dalam isi jurnal

Comment [u13]: Tidak ada dalam isi jurnal

